

BAB III

MERAJUT KEMBALI CITA-CITA POLITIK PERSIS

A. Transisi dan Dampak Reformasi

1. Proses Transisi

Sebelum saya menjelaskan jauh panjang bagaimana proses kejatuhan Presiden Soeharto atau rezim Orde Baru. Saya akan memberikan penjelasan dari salah seorang pemikir yang berasal dari Italia yaitu Thomas Aquinas tentang bagaimana seorang penguasa dalam mendapatkan jabatannya.

Thomas Aquinas berpendapat, bila penguasa tirani memang dapat membebaskan masyarakat dari tirani penguasa yang terbunuh itu, namun sipembunuh tirani itu apabila menjadi penguasa akan dibunuh juga oleh orang lain, artinya sebuah kekerasan penguasa yang berakhir dengan kekerasan-revolusioner, penguasa yang muncul dari paskarevolusioner akan di tumbangkan juga dengan cara kekerasan-revolusioner juga.¹⁴⁷

Berpijak dari ungkapan yang ada di atas, bisa kita mendapat gambaran bagaimana skenario politik Soeharto dalam menjatuhkan rezim Orde lama dengan menggunakan militer yang telah dibangun oleh Nasution dan dimanfaatkannya dengan baik sampai ia berhasil menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. Politik yang dimainkan Soeharto juga mengantarkannya di turunkan dengan cara yang tidak terhormat.

Kejatuhan Soeharto tidak bisa terlepas dari kehilangan kekuatannya di dalam kalangan Militer. Seperti pengaruh yang terbesar adalah Soeharto

¹⁴⁷ Lihar Dr. Firdaus Syam, M.A., *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Hal: 51

kehilangan Alie Moertopo yang meninggal dan hilangnya kepercayaan dari para orang-orang yang dipercayanya dan memanasnya pertarungan politik di dalam Partai Golkar. Spekulasi yang mengatakan putusnya hubungan Soeharto dengan orang kepercayaannya seperti dari kelompok Militer adalah kritik yang diajukan oleh Murdani kepada Soeharto yang terlalu memanjakana anaknya dengan kepentingan-kepentingan bisnis anaknya dengan menggunakan pembelanjaan Militer.

Kritikan ini semakin memuncak ketika Soeharto mengangkat Shudarmo menjadi wakil Presiden. Pengangkatan itu disebabkan kontribusi dan kepekaan politiknya terhadap kondisi politik di Indonesia. Dari pengangkatan Shudarmo dan digantikannya posisi Murdani¹⁴⁸ sebagai Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dengan Try Sutrisno ini membuat sebuah hubungan yang tidak semakin mesra antara Soeharto dengan Militer atau orang kepercayaannya. Melihat kondisi di atas telah membuat perlawanan yang sangat berarti bagi Murdani kepada pemerintahan. Oleh dari itu,¹⁴⁹ Murdani mencoba melakukan sebuah kampanye di kalangan para wakil ABRI di MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) untuk menolak Shudarmo menjadi wakil Presiden.

Sebenarnya kecemburuan Murdani ini tidak terlepas juga dari pengaruh dari Alie Moertopo yang memiliki misi untuk menguasai Golkar dengan orang kepercayaannya (basis non-Muslim). Namun kekuatan yang dibangun oleh Alie

¹⁴⁸ Murdani Ini Adalah Anak Didikan Dari Alie Moertopo Di TNI, Karena Tugas Yang Di Embannya Dan Kurang Pekanya Terhadap Kondisi Politik Dan Inteljen Telah Membuat Soeharto Bepaling Darinya. Sehingga Membuat Soeharto Lebih Dekat Dengan Shudarmo Yang Memiliki Kepekaan Politik Yang Bagus.

¹⁴⁹ Lihat Yudi Latif, *Intelegensia Muslim Dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, (Jakarta, Demokrasi Project, 2012), Hal, 675.

Moertopo semuanya menjadi bias dan surut ketika Golkar di bawah kepemimpinan Shudarmo yang lebih cenderung memiliki kedekatan dan mengakomodasi para aktivis Islam. Sikap dari Shudarmo ini semakin membuat para kelompok Militer marah ketika waktu Shudarmo menjadi sekretaris negara yang menjauhkan para Militer dari kontrak-kontrak yang menggiurkan yang selama ini telah membuat mereka makmur.

Bahkan dengan kedekatan Shudarmo dengan aktivis Islam telah membuat pemerintahan Soeharto di dalam masa-masa akhir pemerintahannya membuka komunikasi yang baik dengan para aktivis ataupun kelompok Islam lainnya. Bahkan Soeharto juga aktif dalam pembangunan Mesjid, memberikan dana terhadap para da'i yang siap untuk berdakwah keberbagai penjuru Indonesia dan kemudian juga merangkul para tenokrat Muslim untuk ikut ke dalam MPR di bawah utusan Golkar.

Dimasa akhir kepemimpinan Soeharto, gerakan oposisional bermuculan datang dari NGO-NGO yang berorientasi kepada usaha menciptakan *civil society* (masyarakat madani), para aktivis sastra, seni dan budaya, serta para jurnalis independen. Selain itu, gerakan oposisi juga datang dari kelompok-kelompok barisan sakit hati dari mereka yang pernah menjadi bagian elite kekuasaan yang kemudian terpental dari struktur-struktur politik formal, kemudian runtuhnya legitimasi Orde Baru sebagai akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun

Dari perpecahan internal para elit penguasa dan krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia telah membuat pemerintahan Soeharto diambang kejatuhan dari pucuk kekuasaan yang selama ini telah diembannya puluhan tahun.

Dengan adanya krisis ekonomi,¹⁵¹ Soeharto tidak mampu lagi mendistribusikan sumber-sumber ekonomi untuk mengontrol, membayar dan mengendalikan mesin-mesin (utamanya Golkar, militer dan birokrasi) yang bekerja untuk kekuasaannya, sehingga Soeharto kehilangan legitimasinya. Dalam kerangka itu, protes sosial menjadi meluas dan kepercayaan terhadap Soeharto menjadi menjadi pudar. Gerakan massa yang masif menimbulkan kepanikan di tingkat elit yang dekat dengan Soeharto sehingga mereka sebagian meninggalkan Soeharto sendirian.

Akibat krisis ekonomi, perpecahan para elit¹⁵² yang dulu loyal kepada Soeharto sekarang telah berbalik arah menjadi problem bagi pemerintahan Soeharto ditambah lagi adanya desakan dari DPR agar mengundurkan dirinya dari jabatannya. Sehingga akibat dari itu semua telah membuat Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Dalam pengunduran ini nampaknya Soeharto mencoba untuk mengundur-ngundur waktu.

Seperti ketika Soeharto tidak ingin melimpahkan jabatannya kepada Habibie yang baginya tidak memiliki kapabilitas. Padahal kalau di lihat naiknya Habibie menjadi wakil presiden tidak terlepas dari keinginan Soeharto untuk merangkul

¹⁵¹Gregorius Sahdan. *Jalan Transisi Demokrasi Paska Soeharto*, (Yogyakarta, Pondok Edukasi, 2004), hal. 244.

¹⁵²Di Dalam Kubu Golkar Juga Terjadi Konflik, Dimana Harmoko Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Liris Mendesak Presiden Turun Dari Jabatannya Dan Agar Dilakukan Reformasi

potensi yang ada di dalam dirinya. Namun atas desakan para kelompok Islam yang tergabung dengan ICMI (Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia) atau kesembilan pemimpin Islam, mahasiswa dan DPR/MPR akhirnya Soeharto mempertimbangkan usulan mereka. Sehingga akhirnya Soeharto mengambil kesimpulan untuk mengundurkan diri.

Pada akhirnya Soeharto mundur dan melimpahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Habibie yang juga tokoh Golkar. Akan tetapi pergantian rezim ini tidak disertai pergantian partai yang memerintah. Bahkan orang-orang Golkar masih mendominasi posisi-posisi kunci di eksekutif dan legislatif.¹⁵³ Kemudian berhentinya Soeharto sebagai presiden menjadikan Golkar ibarat “ayam ditinggalkan induknya”. Tak pelak, konflik di tubuh Golkar yang selama Soeharto berkuasa tidak pernah kelihatan tiba-tiba meletup kepermukaan.¹⁵⁴

Mundurinya Soeharto dari jabatan kepresidenannya dan mengumumkan bahwa Wakil Presiden Habibie akan menuntaskan jabatannya sampai 2003 dan kabinet baru akan segera dibentuk. Kurangnya legitimasi politik Habibie, citranya sebagai anak didik Soeharto dan adanya desakan untuk penyegaran pemerintah. Karena itu,¹⁵⁵ Habibie tak punya pilihan lain selain mengikuti opini publik yang menuntut segera dilakukan pemilihan umum secepat mungkin. Kemudian akhirnya Habibie menjadwalkan pemilihan umum pada tanggal 7 Juni 1999.¹⁵⁶

¹⁵³ Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar Di tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 72.

¹⁵⁴ *Ibid*, Hal, 77

¹⁵⁵ Sebenarnya Dari Pelimpahan Jabatan Yang Diterima Habibie Ini Meneruskan Pemerintahan Soeharto Sampai Tahun 2003. Namun Desakan Dari Para Eforia Reformasi Yang Telah Berhasil Memukul Soeharto Mundur Membuat Habibie Mendapatkan Desakan Agar Pemilu Dipercepat.

¹⁵⁶ Lihat Yudi Latif, *Intelegensia Muslim Dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke 20* (Jakarta: Demokrasi Project, 2012), Hal. 301, 302

2. Dampak Reformasi

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru telah menyisakan eforia bagi bangsa Indonesia. Semua masyarakat yang terlibat langsung dalam menjatuhkan pemerintahan Orde Baru maupun tidak telah merasakan kebahagiaan dalam menatap bangsa yang penuh dengan harapan baru. Bagaimana tidak, selama puluhan tahun mereka hidup di zaman yang otoriter, penuh dengan intimidasi, penuh dengan skenario KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) yang dilakukan oleh penguasa dengan orang-orang kepercayaan.

Bahkan Pramodya Ananta Toer menggambarkan bagaimana politik Orde Baru adalah sebagai berikut: *pertama, birokrasinya milik Orde Baru, kedua, Militernya milik Orde Baru, ketiga, politiknya politik kekuasaan Orde Baru. Bagaimana saya bisa percaya dan karena itu secara pribadi saya tidak mau mengikuti Pemilu, karena seandainya saya memilih dalam Pemilu, sama saja saya memilih kepala penjara saya sendiri.*¹⁵⁷

Di balik kejayaan Soeharto yang menarik selain yang telah dijelaskan di atas adalah bagaimana semua kekuasaan Soeharto diamini dan dibenarkan oleh para intelektual yang gelarnya berlapis-lapis dan kaum akademisi bangsa Indonesia sampai puluhan tahun lamanya. Semuanya tiarap dengan kekuasaan Soeharto dan bahkan yang lebih menjijikkan adalah bagaimana mencari hidup di zaman Soeharto dengan kekayaan dan jabatan yang diberikannya.

Pengalaman Orde Baru telah mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan

¹⁵⁷Lihat Video Dokumenternya Pramodya Ananta Toer (Re-Upload From Goodreads

Pramodya Ananta Toer) Author Of Bumi Manusia, Youtube Part 2

penderitaan rakyat. Oleh karena itu, masyarakat sepakat yakni dengan melakukan demokratisasi sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan dan pengawasan terhadap lembaga esekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat (DPR).¹⁵⁸

Sehubungan dengan alasan-alasan di atas, pada Sidang Umum (SU) MPR tahun 1999, partai-partai politik yang ada di MPR melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Pada SU MPR tahun 1999 terjadi perubahan pertama terhadap UUD 1945. Perubahan pertama ini meliputi Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21. Pasal-pasal yang mengalami perubahan pertama itu berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh esekutif.¹⁵⁹

Era reformasi dalam bangsa Indonesia yang paling memberikan perhatian kita adalah bagaimana amandemen UUD 1945 dan amandemen UU tentang Partai politik. Bahkan Sigit Pamungkas mengatakan, terdapat dua momentum yang mengubah dan mempengaruhi dinamika dan struktur kepartaian pada masa ini yaitu:¹⁶⁰ *pertama*, diterbitkannya UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik. *Kedua*, adanya amandemen UUD 1945. Amandemen ini menjadi kontribusi paling penting dari partai politik dalam menata dan mengarahkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dua hak tersebut kemudian menjadi semacam milenstone yang mengubah dan membentuk struktur kepartaian dan dinamika politik yang saat ini.

¹⁵⁸Lihat Prof, Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), Hal. 134.

¹⁵⁹Lihat Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2006), Hal. 182.

¹⁶⁰Lihat Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori Dan Praktik Di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Manajemen, Politik, Ekonomi, Dan Welfarism 2012), Hal. 156.

Dengan adanya dua momentum ini setidaknya telah membuat fenomena dengan maraknya berdiri partai politik di paska reformasi. Kemudian dengan adanya amandemen UDD 1945 juga telah membuka kisah lama di dalam bangsa Indonesia yaitu antara Islam dan kebangsaan. Sebab, dengan amandemen pasal 29 di dalam MPR tersebut yaitu bagaimana membahas tentang posisi agama di dalam negara. Tentu fenomena ini tidak bisa terlepas dari kedua pemerintahan yang sebelumnya yaitu Orde Lama dan Orde Baru.

Lahirnya paket UU Politik tahun 1999 yang berisi UU No. 2/1999 tentang partai politik, UU No. 3/1999 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan Wakil Rakyat memberikan garansi formal terhadap kompetisi, partisipasi dan liberalisasi berlangsung secara demokratis.¹⁶¹

Setidaknya dengan adanya reformasi ini, merupakan sebuah kehebatan yang luar biasa oleh para segenap rakyat Indonesia. Sebab, mereka telah berhasil menyelamatkan bangsa Indonesia ketika di dalam keadaan yang tidak baik dan terancam oleh kekuasaan yang sangat tidak berpihak kepada rakyat. Karena sebagai rakyat, terkhusus kaum intelektual dan mahasiswa merupakan gardu terdepan dalam sebuah bangsa. Baik dan buruknya adalah tergantung dari mereka dan seharusnya ketika mereka tahu kondisi bangsa sedang terancam sehendaknyalah mereka orang yang pertama kali untuk turun memperbaikinya.

Tentu harapan dari masyarakat dari adanya reformasi dari sistem pemerintahan yang terdahulu bersifat sentralistik dan otoriter berganti dengan pemerintahan baru yaitu yang lebih demokratis. Karena Asal kata dari demokrasi

¹⁶¹ Lihat Sutopo Eka, *Tuntutan Demokrasi di Indonesia: Berakhirnya Orde Baru* (Yogyakarta: ...)

itu sendiri hadir pada abad ke-5 SM di Yunani. berasal dari bahasa *demos* yang artinya rakyat dan *cratos* yaitu pemerintahan. Maka dari itu bisalah disebut dengan pemerintahan rakyat yang mana dari rakyat, untuk rakyat. Sebab. kalau kita maknai kembali maksud dari demokrasi itu adalah bahwasanya penekanan demokratis tersebut adalah bagaimana kedaulatan itu berada di tangan rakyat.

Jadi sudah saatnya para elit politik, kaum muda, kaum terpelajar, cendekiawan, akademisi dan lain sebagainya untuk saling bergandeng tangan dan bersatu dalam sebuah misi besar bersama untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun apabila hal itu belum juga dijadikan prioritas oleh para gardu dan generasi bangsa Indonesia ini. Maka sudah saatnya rakyat untuk menyebut bahwa reformasi ini hanyalah bersifat seremonial. Karena perang yang sesungguhnya itu bukanlah terletak dalam keberhasilan untuk menjatuhkan pemerintah Orde Baru. Tapi melainkan yang dimaksud perang disini adalah bagaimana para generasi baru ini menghadirkan sebuah konsep pemerintahan yang menjadi semangat reformasi yaitu demi kebaikan bersama untuk semua lapisan masyarakat.

Kemudian perang yang sesungguhnya disini adalah merupakan bagaimana semua lapisan masyarakat, baik elit politik, birokrasi, Militer, cendekiawan, akademisi dan seterusnya untuk bisa melawan nafsu dirinya terhadap kekuasaan yang bersifat demi kepentingan pribadi semata. Seperti yang kita ketahui sebelumnya gagal pemerintahan Orde Baru tidak terlepas dari sikap

pemerintahannya yang rakus, yang mana mencari kekayaan dari harta rakyat¹⁶² demi kepuasan pribadi yang hanya bersifat onani.

B. Terbukanya Ruang Publik

Hadirnya reformasi telah membuat dampak yang sangat berharga bagi semua organisasi keagamaan, sosial dan maupun partai politik. Bagaimana tidak, reformasi telah membuat sistem pemerintahan Indonesia yang dahulunya sangat sentralistik dan otoriter sekarang telah berganti ke arah yang lebih demokratis dari pada pemerintahan sebelumnya.

Reformasi menjadi momentum untuk terbukanya ruang publik dari pemerintahan yang sebelumnya dijadikan pemerintahan atau negara bersifat ruang privat. Ruang publik¹⁶³ itu sendiri adalah merupakan lingkup atau ruang yang aktual dan abstrak untuk berkomunikasi dan pembentukan opini.

Ruang publik telah menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dibandingkan dalam pemerintahan yang sebelum reformasi (Orde Baru). Dalam memanfaatkan ruang publik ini, maka tidak heran banyaknya bermunculan organisasi keagamaan (gerakan Islam transnasional) dan partai-partai politik yang dulu sempat menjadi kelompok pinggiran dalam rezim Orde Baru, yang kemudian sekarang hadir menjadi kelompok dominan dalam keikutsertaan langsung untuk mengurus negara dalam mencapai kebaikan bersama.

¹⁶²Kekayaan Disini Sesuai Dengan Bunyi UUD 1945 BAB XIV Pasal 33, Yang Membahas Tentang Kesejahteraan Sosial

¹⁶³Lihat Jenny Edkins-Nick Vaughan Williams, *Teori-Teori Kritis: Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*, (Yogyakarta, Pustaka Baca, 2010), Hal, 256.

Reformasi juga menjadi babak baru dalam menata kembali hubungan anatara agama dalam negara. Sebab, dengan adanya amandemen dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 29. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa reformasi juga sebuah pertanda dengan kelahiran partai politik Islam untuk terjun ke dalam Pemilu yang muncul dengan persentase yang berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Maka dengan itu tidak salah dalam masalah klasik yaitu terkait dasar negara ini akan menjadi sebuah pertarungan politik yang tidak akan pernah padam sampai hadirnya reformasi dalam perkembangan bangsa Indonesia.

Persis sendiri sebagai organisasi keagamaan yang sedari dulu konsisten dalam memperjuangkan dasar negara Islam atau yang sesuai dengan hukum Islam bisa kita lihat dengan perjuangannya bersama Masyumi dan juga berusaha dalam membantu dakwah DDII untuk mencapai Islamisasi kampus-kampus yang sekular dengan mencapai tujuan perjuangan Persis itu sendiri.

Oleh sebab itu, Persis organisasi keagamaan moderen Islam yang memiliki misi bertujuan untuk “terlaksananya syariat Islam berlandaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah secara kaffah dalam segala aspek kehidupan”.¹⁶⁴ Maka dengan memiliki misi seperti ini Persis tidak akan pernah berhenti dalam memperjuangkan dan akan selalu akan memperjuangkan dasar negara yang sesuai dengan hukum-hukum Islam.

Jika dalam periode pemerintahan sebelumnya Persis mendapat kesulitan dalam memperjuangkan terciptanya syariat Islam bersama Masyumi di Indonesia, maka setelah adanya momentum reformasi Persis mencoba kembali dalam

¹⁶⁴Lihat H. Uyun Kamiluddin, *Meyorat Ijtihad Persis: Fungsi Dan Peranan Dalam Pembinaan*

memperjuangkan cita-cita politiknya untuk memperjuangkan negara yang berdasarkan syariat Islam agar secepatnya bisa berdiri dalam alam reformasi ini.

Sikap yang diberikan oleh Persis dalam memperjuangkan syariat Islam paska reformasi bisa kita lihat dari dukungan Pimpinan Pusat Persatuan Islam dalam amandemen pasal 29 yang mencantumkan tujuh kata Piagam Jakarta. Dukungan ini antara lain didasarkan pada pandangan bahwa Islam merupakan agama yang bukan berkaitan dengan masalah individu antara makhluk dengan Tuhan semesta, melainkan juga menyangkut hubungan horisontal sosial dan politik.¹⁶⁵

Oleh karena itu, maka tidak salah jika Persis di era reformasi ini memperjuangkan misinya kembali dengan adanya terbuka ruang publik dalam kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik seperti yang telah dijelaskan di atas. Untuk itu, dalam mencapai tujuan negara berdasarkan syariat Islam paska reformasi yang bisa dilakukan Persis pada saat itu hanyalah dengan memberi pernyataan sikap dan dukungan kepada partai politik (PBB) yang terlibat dalam menangani masalah amandemen pasal 29 di MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dalam membahas posisi agama dalam sebuah negara.

C. Politik Persis paska reformasi

1) Partisipasi politik

Dalam partisipasi politik dapat dilihat melalui defenisi, bentuk dan tingkatan, juga dapat dilihat dari tipologi dan model.¹⁶⁶ *Pertama*, sebagai defenisi

¹⁶⁵ Lihat Abdul Aziz, *Politik Fundamentalis: Majelis Mujahidin Indonesia Dan Cita-Cita Penegakan Syariat Islam*, (Yogyakarta, Institute Of Internasional Studies, 2011), Hal, 108.

¹⁶⁶ Lihat Abdul Aziz, *Politik Fundamentalis: Majelis Mujahidin Indonesia Dan Cita-Cita Penegakan Syariat Islam*, (Yogyakarta, Institute Of Internasional Studies, 2011), Hal, 108.

umum partisipasi politik dapat dikatakan bahwa kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).¹⁶⁷

Partisipasi politik bisa dikatakan sebuah panggilan jiwa dari seluruh masyarakat dan warga negara yang ikut terlibat langsung dalam keberlangsungan arah dan tujuan negara yang mereka tempati. Di negara demokrasi konsepsi partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan.¹⁶⁸

Dalam penjelasan terkait dengan partisipasi politik ini bisa dilakukan dalam bentuk individu maupun kolektif. Pada dasarnya adalah bagaimana rakyat berpartisipasi dalam menunjuk dan terlibat langsung dalam menentukan nasib bangsanya yang dititipkan kepada seseorang atau kelompok.

Dalam hal ini termasuk juga Persis, sebagai organisasi yang memiliki pandangan politik dalam mewujudkan nilai-nilai Islam dalam berkehidupan disuatu negara. Tentu saja pernah ikut dan terlibat langsung dalam partisipasi politik yaitu katakanlah Pemilu. Untuk hal ini, Persis memiliki partisipasi politik yang akan penulis jelaskan dalam dua tahap, yaitu bagaimana partisipasi politik Persis di awal transisi dan era reformasi.

¹⁶⁷ Dapat dilihat Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi revisi (Jakarta, PT

2) Partisipasi politik Persis Awal Transisi

Sejauh ini penulis telah banyak bercerita bagaimana partisipasi politik Persis pada saat masih bersama dengan Masyumi. Setelah dengan Masyumi, pada era Orde Baru Persis seakan menjaga jarak dalam dunia politik yang selama ini tidak asing lagi bagi Persis. Ini semua tentu bukan tanpa sebab. Karena pada zaman Orde Baru adalah saat-saat tersulit bagi Persis dalam mengembangkan organisasinya di bawah kekuatan Orde Baru yang sangat sentralistik dan otoriter yang bahkan kata Pramoedya Ananta Toer adalah pemerintahan fasisme yang diterapkan Orde Baru.

Dalam diskusi dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Persis¹⁶⁹ yang mengatakan bahwasanya, “Persis di zaman Orde Baru tidak mengambil andil dalam politik dan tidak mendukung partai manapun. Kemudian yang dilakukan Persis adalah bagaimana untuk mempertahankan diri”.

Awal reformasi merupakan babak baru bagi Persis dalam merespon kembali alur dan gerak perpolitikan di Indonesia dalam rangka mencapai pandangan politik Persis yang tidak ingin memisahkan agama dan politik demi terciptanya hukum serta undang-undang untuk manusia dari Tuhan seutuhnya. Itu bisa kita pahami dalam sikap Persis yang ingin mengembalikan tujuh kata Piagam Jakarta dalam amandemen UDD 1945, Pasal 29.

Hujar dari Tiar Anwar Bachtiar¹⁷⁰ selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam yang menjadi pertimbangan Persis dalam Pemilu paska reformasi adalah

¹⁶⁹ Diskusi Yang Peneliti Lakukan Adalah Bersama Ustad Tiar Anwar Bachtiar (Ketua Umum Pimpinan Pemuda Pusat Persis) Di Garut. Dalam Diskusi Ini Peneliti Berdiskusi Di Rumah Kediannya Atau Didekat Kampus STAIPI Milik Persis Pada Tanggal 2 Oktober 2014.

¹⁷⁰ Wawancara Dengan Ustad Tiar Anwar Bachtiar

Persis melihat adanya peluang atau kesempatan politik. Dalam Pemilu pertama paska reformasi pada tahun 1999 Persis hanya mendukung satu Partai saja yaitu PBB.

Dalam mendukung PBB ini, bahwasanya sebelumnya Persis pernah bergabung di dalam BKUI (Badan Koordinasi Umat Islam) yang kelak nanti BKUI melahirkan PBB. Sehingga secara tidak langsung Persis terlibat dalam membidani kelahiran PBB. Kemudian Persis juga berharap dengan PBB yang berazas Islam akan bisa menjadi pressure (penekanan) bersama-sama partai lain yang menjadikan Islam sebagai azas perjuangannya dalam MPR dan DPR yang akan membahas RUU (Rancangan Undang-Undang) kepartian dan Pemilu untuk mengakomodasikannya. Yang mana, jika partai politik berhasil berazas Islam imbas positifnya akan dirasakan oleh Persis dan ormas Islam lainnya untuk menjadikan Islam sebagai azas jam'iyah.¹⁷¹

Terlepas dari itu semua, adanya dukungan Persis kepada PBB adalah merupakan sebuah antisipasi dari Persis dalam mengatasi adanya konflik serta perpecahan yang terjadi di dalam tubuh Persis. Karena selama ini, Persis selalu mendapat kesulitan dan konflik di internal ketika ada bersinggungan dengan politik. Terlepas dari itu semua, euforia yang sedang terjadi setelah dengan adanya reformasi telah banyak membuat kader-kader Persis yang tertarik serta ikut berkiprah dengan Partai politik ke dalam politik praktis.

¹⁷¹ Ibid., hal. 211-212.

Maka dalam menyikapi masalah ini, dua bulan kemudian pada tanggal 15 November 1998 Pimpinan Pusat Persis melalui Musyawarah Kerja mengambil sikap sebagai berikut:¹⁷²

- a) Persatuan Islam tetap istiqomah tidak akan menjadi partai politik.
- b) Persis tidak akan mendirikan partai politik.
- c) Secara organisatoris Persis tidak akan menempatkan kadernya pada partai politik manapun.
- d) Keterlibatan seorang anggota Persis dalam keanggotaan/kepengurusan partai politik, bersifat pribadi dan kepada yang bersangkutan diharapkan:
 - I. Yang bersangkutan diharuskan mampu menempuh ketentuan Qanun Dakhili.
 - II. Keterlibatannya dalam partai politik tidak mengganggu kegiatan dalam jam'iyah.
 - III. Tidak menimbulkan friksi dan membawa konflik ke dalam tubuh jam'iyah.
- e) Untuk mengurangi kemungkinan munculnya friksi atau konflik, sebaiknya anggota Persis menyalurkan aspirasi politiknya ke satu partai politik Islam yang sama yaitu Partai Bulan Bintang (PBB).

Dalam menyikapi Pemilu pada tahun 1999 ini Persis lebih menggunakan sistem intruksi dari atas dan ke bawah kepada kader-kader dan jam'iyah yang berada di bawah naungan Persis. Apa yang dilakukan Persis adalah

¹⁷² Abu Al-Ghifari – Dani Asmara, SS. *Ibid*, hal. 78.

mengisyaratkan keteguhan Persis untuk tidak ingin menjadi partai politik. Meskipun ruang politik paska reformasi ini sangat terbuka dengan lebar.

Bahkan bukan sampai di sana saja, ketika ruang politik terbuka tidak satupun kader Persis yang mencoba untuk mendirikan partai politik dalam Pemilu paska reformasi. Padahal seperti yang kita ketahui Persis merupakan organisasi keagamaan yang di dalam ranah pemerintahan sendiri Persis masih memiliki mimpi yang besar terkait pancasila yang tidak sesuai dengan pendapat Persis.

Hal ini tentu sangat berbeda apabila kita melihat awal transisi dengan Pemilu 1999 yang dilakukan oleh organisasi keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah dan NU kadernya sebelum Pemilu 1999 mendirikan partai politik. Di sini tidak ada yang salah bagi Persis, yang perlu kita tarik hikmahnya adalah bahwa Persis konsisten dengan sikapnya sebagai organisasi keagamaan dan mengembangkann dakwah serta pendidikan yang digarap oleh Persis.

3) Partisipasi Politik Persis Era Reformasi

Ketika Muhammadiyah dengan kadernya Amien Rais dan NU dengan K.H. Abdurrahman Wahid mengambil peran yang sangat sinifikan dalam pertarungan politik dalam Pemilu diawal transisi. Maka yang dilakukan Persis adalah tidaklah seperti yang dilakukan oleh teman sesama berdakwah mereka. Dalam melihat kondisi seperti ini lebih ustad Tiar mengatakan:¹⁷³

Sebab, dalam Pemilu apa yang dilihatkan sebenarnya oleh Persis adalah bersifat responsif. Yang dalam artian, ketika ada tantangan politik maka kita Persis akan mencoba menjawab tantangan tersebut. Jadi dalam politik ini sikap

¹⁷³ Hasil Wawancara Dengan Ustad Tiar Anwar Bachtiar

dari Persis bukanlah bersifat konstruktif dalam membangun kekuatan politik. Itu semua berbeda dengan NU yang waktu reformasi mungkin saja membangun kekuatan politik dalam membikin PKB dan misalnya Muhammadiyah dengan PAN. Kemudian itu semua tidak terjadi oleh Persis, yang mana Persis tidak ikut dalam arus itu. Sebab dalam visi dan misi kita bagaimana untuk melakukan perkembangan dakwah dan pendidikan. Maka dalam politik yang dilakukan oleh Persis hanyalah bersifat responsif semata, agar agama bisa tegak. kemudian dakwah dan pendidikan Persis bisa berkembang.

Kemudian diawal transisi kita juga bisa memahami bahwa Persis dalam melewati Pemilu bisa kita lihat dan pahami sebagai sebuah tindakan yang sangat kolektive yaitu bersifat intruksi dari Pimpinan Pusat Persis kepada jam'iyahnya atau otonom Persis. Namun pada era reformasi dalam Pemilu selanjutnya 2004-2014 Persis tidak lagi bersifat kolektif, tapi lebih menekankan kepada kebebasan kader dan jam'iyah yang dimiliki oleh Persis sendiri.

Tentu ini semua sangat berbeda ketika kita lihat dengan kondisi politik Persis yang diawal transisi dengan hanya menisbatkan dukungannya kepada PBB dalam Pemilu. Adapun yang dilakukan Persis ketika era reformasi atau Pemilu 2004-2014 dalam memberikan kebebasan bagi jam'iyahnya dalam Pemilu adalah membuat sebuah pertimbangan atau Ijtihad politik Persis.

Kemudian yang menjadi pertimbangan dalam Persis untuk mendukung partai politik yaitu bagaimana partai politik itu ia bisa menjadi alat perjuangan umat. Alasan di awal transisi Persis hanya mendukung satu partai yaitu PBB

adalah agar Persis dan suaranya fokus hanya ke satu partai saja. Tapi ketika

Pemilu selanjutnya ini tidak berlaku lagi, sebab ini rasanya menghambat komunikasi politik Persis dengan partai-partai lainnya. Sehingga untuk Pemilu selanjutnya Persis mencoba membuka kran komunikasi politik dengan partai-partai politik lainnya.¹⁷⁴

Dengan adanya membuka kran atau komunikasi politik antara Persis dengan partai politik bahwasanya bentuk dukungan yang menjadi pertimbangan Persis adalah Dukungan yang diberikan oleh Persis terhadap partai dalam Pemilu adalah mempersilahkan partai politik tersebut untuk berkampanye dan mencari dukungan kepada jam'iyah Persis dan itu semua di perbolehkan saja. Dalam artian apa yang dilakukan adalah untuk menjaga komunikasi Persis dengan partai politik tersebut.¹⁷⁵

Karena hanya seperti itulah yang mungkin bisa dilakukan oleh Persis dalam merespon arus perpolitikan yang ada di Indonesia semenjak datangnya reformasi. Sebagai organisasi keagamaan yang tidak memiliki keanggotaan istimewa apapun dengan partai politik manapun apa yang dilakukan Persis adalah bagaimana menitipkan cita-cita politiknya kepada partai-partai politik yang berkembang pada saat reformasi. Yang itu semua tentu sesuai dengan pertimbangan Persis, agar partisipasi Persis ini bisa membantu partai politik tersebut dan juga memberikan dampak kepada Persis.

Dalam kerangka politik Persis tidak terlepas dari cita-cita M. Natsir dan K.H. M. Isya Anshary dalam memperjuangkan syariat Islam untuk berdiri di Indonesia. Dan itu semua sampai sekarang masih dipegang oleh Persis. Artinya

¹⁷⁴Wawancara Dengan Ustad Tiar Anwar Bachtiar (Hasil Diskusi)

¹⁷⁵Wawancara Dengan Ustad Tiar Anwar Bachtiar (Hasil Diskusi)

Persis dalam kerangka politik adalah siapa saja partai yang memperjuangkan syariat Islam maka ia akan didukung oleh Persis.

Karena di dalam Islam yang namanya politik itu itu dua saja intin dari tujuannya yaitu yang *pertama* adalah mewujudkan dan memperjuangkan kesejahteraan umat dan yang *kedua*, adalah menjaga agama. Tujuan dari menjaga agama adalah agar agama ia bisa tegak. Maka seandainya jika ada partai yang tidak memperjuangkan syariat Islam, berarti partai tersebut tidak bisa menegakkan agama. Sebab agama itu adanya di dalam syariat Islam itu sendiri. Artinya jika agama bisa tegak di bumi dan syariat Islam bisa ditegakkan, maka dimungkinkan tujuan politik di dalam Islam itu bisa terwujud. Jadi partai manapunlah yang akan memperjuangkan syariat Islam, dia akan diberi dukungan oleh Persis.¹⁷⁶

Apa yang dijelaskan oleh Tiar Anwar Bachtiar di atas, terkait dengan kegunaan dan tujuan politik bagi Islam atau Persis, sebenarnya memiliki kesamaan dengan pandangan pemikir Islam yaitu Abu Al-Hassan Ali ibn Habib al-Mawardi yang mengatakan tujuan dari kepala negara itu hanya dua saja yaitu:¹⁷⁷ yang *pertama*, untuk memelihara agama dan yang *kedua*, penguasa bagi Al-Mawardi adalah pelindung agama. Dialah yang melindungi agama dari pendapat-pendapat sesat yang merusak kemurnian agama, mencegah Muslim dari kemurtadan dan melindunginya dari kemungkaran.

Setelah berpisah dari Masyumi dan masuk arus reformasi. apa yang dilakukan Persis dalam dunia perpolitikan bangsa Indonesia adalah bagaimana

¹⁷⁶Wawancara Dengan Ustad Tiar Anwar Bachtiar (Hasil Diskusi)

¹⁷⁷Dr. Muhammad Iqbal, M.AG-Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kanisius Bandung, 2001), h. 6

Persis mengambil posisi sebagai kelompok penekan atau *Presuare group*. Namun bukan berarti Persis tidak ikut dalam berpartisipasi dalam setiap diadakannya Pemilu setiap lima tahun sekali, seperti pemilihan Presiden maupun kepala daerah. Namun yang membedakannya dengan Pemilu yang sebelumnya adalah bahwa¹⁷⁸ untuk pemilu selanjutnya setelah mendukung hanya PBB saja, namun untuk Pemilu selanjutnya Persis juga mendukung PKS, PAN, PPP, kemudian dalam mendukung partai ini Persis lebih melihat orang mana yang bisa dipercaya.

Apa yang diutarakan oleh Tiar Anwar Bachtiar yang ada di atas, nampaknya Persis memiliki kecenderungan dalam menentukan partai mana yang harus dipilih Persis dalam Pemilu paska reformasi adalah kebanyakan dari partai Islam ataupun partai yang memiliki kedekatan dengan organisasi keagamaan seperti PAN. yang Persis agak susah membuka komunikasi dalam partai yang berbasis keagamaan adalah PKB. Sebab, bagi Tiar Anwar Bachtiar¹⁷⁹ yang agak susah masuk adalah ke PKB, sebab PKB agak tertutup sistemnya.

Kepercayaan yang diberikan oleh Persis dalam mendukung partai politik Islam bisa dikatakan merupakan persamaan ideologi, visi dan misi yang akan mereka capai bersama. Yaitu bagaimana mengusahakan nilai-nilai Islam bisa berkembang dalam suatu negara seperti pengambilan kebijakan yang akan diambil partai Islam. Namun sayang, apa yang diinginkan Persis dalam hidup di dalam sebuah bangsa yaitu agar bisa mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia ini agaknya ternodai dengan mencuatnya kasus korupsi yang melibatkan partai-partai yang memiliki platform

¹⁷⁸Wawancara Dengan Ustad Tiar Anwar Bachtiar (Hasil Diskusi)

¹⁷⁹...

Islam. Dengan apa yang diperlihatkan oleh partai Islam yang tersandung kasus korupsi ini tentu sangat melanggar nilai-nilai Islam yang selama ini selalu Partai Islam acukan sebagai pedoman dan semangat dalam perjuangan partainya.

Namun hal seperti yang penulis sampaikan di atas, nampaknya tidak menjadi alasan kuat bagi Persis untuk tidak mendukung partai-partai Islam. Sepertinya apa yang melanda partai Islam tidak terlalu menjadi legitimasi Persis untuk tidak mendukung partai politik Islam. Adapun pendapat Ustad Tiar Anwar Bachtiar adalah sebagai berikut:¹⁸⁰

Jadi kasus korupsi buka merupakan sebuah indikator partai politik Islam tidak lagi memperjuangkan syariat Islam. Sebab, kalau melihat gejala politik di Indonesia saat ini, kelihatannya tidak ada partai politik yang untuk sekarang ini yang tidak korupsi. Hampir semuanya terlibat dalam korupsi dan yang korupsi itu belum tentu juga sebenarnya mereka korupsi. Bisa jadi ia menjadi permainan politik dari media, sementara kita hanya mendapatkan informasi hanya sebatas dari media saja.

Meskipun partai Islam korupsi, itu bukan berarti partai lain tidak korupsi. Itu semua bukan hanya menimpa partai Islam. Bahkan sebenarnya yang paling banyak korupsi tersebut dilakukan oleh partai-partai nasionalis atau sekular seperti PDIP (Parti demokrasi Indonesia Perjuangan), Golkar, Demokrat adalah partai-partai yang banyak terlibat korupsi juga. Dan saya rasa partai Islam sedikit yang tersandung kasus korupsi dibandingkan partai nasionalis.

¹⁸⁰Wawancara Dengan Ustad Tiar Anwar Bachtiar (Hasil Diskusi)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Tiar Anwar Bachtiar¹⁸¹ adalah Pertimbangan Persis dalam mendukung partai politik dalam Pemilu. secara platform partai tersebut masih mau memperjuangkan Islam dan ikut dalam garis politik Islam, maka itu akan didukung oleh Persis.

Dari penjelasan yang ada di atas, nampaknya ada pergeseran strategi politik Persis dalam merespon arus politik yang ada di Indonesia. Sebab, kita bisa melihat dari fase awal transisi dalam Pemilu 1999 Persis hanya mendukung satu partai politik yaitu PBB dan selanjutnya pada era reformasi atau pemilu 2004-2014 Persis lebih memilih membuka komunikasi politik dengan lebih dari satu partai politik.

Namun dari apa perbedaan strategi yang ada di atas point yang bisa kita ambil yaitu, bahwasanya meskipun ada perbedaan strategi dalam mendukung partai politik dalam Pemilu selanjutnya, setidaknya dalam mendukung partai politik, meskipun tidak hanya terpaku kepada satu partai politik, yang terpenting adalah dalam pertimbangan untuk mendukung partai politik Persis selalu menempatkan pilihan-pilihan politiknya kepada partai yang memiliki identitas politik Islam.

D. Analisis Dinamika Afiliasi Politik Persis

Analisis terhadap bagaimana terjadinya dinamika afiliasi politik Persis ini dilakukan melalui pendekatan aktivisme Islam. Dengan pendekatan aktivisme Islam dapat teridentifikasi latar belakang afiliasi politik Persis, kemudian karakter afiliasi Persis dan penyebab afiliasi dan serta respon politik Persis. Metode ini

¹⁸¹Wawancara Dengan Ustad Tiar Anwar Bachtiar (Hasil Diskusi)

memiliki sifat yang hanya sebagai penjelas dan serta sebagai untuk menguatkan pandangan kita atau penulis dalam melihat yang melatar belakangi afiliasi politik Persis dalam menghadapi Pemilu. Kemudian analisis aktivisme Islam ini penulis lakukan dalam melihat kesesuaian antara terbukanya Ruang Publik Paska reformasi untuk Persis dalam merespon politik demi tercapainya tujuan politik Persis yang sedikit banyaknya telah penulis paparkan di atas dengan kondisi transformasi politik Persis paska reformasi di dalam arus perpolitikan di Indonesia. Selanjutnya penulis mencoba menganalisis latar belakang afiliasi politik Persis, karakter afiliasi politik Persis dan penyebab afiliasi atau respon politik Persis yang akan penulis jelaskan dengan kerangka aktivisme Islam.

1. Latar Belakang dan Penyebab Afiliasi Politik Persis

A. Analisis Perseteruan Politik Persis

Analisis Perseteruan ini adalah disebabkan oleh kuatnya pengaruh modernisasi oleh negara Muslim (Timur Tengah) yang berkiblat ke negara-negara non-Muslim seperti maraknya kehidupan *westernisasi*, gaya berpakaian, *sekularisasi* dan bahasa-bahasa Barat. Inti dari perseteruan ini adalah bagaimana modernisasi telah menjadi momok yang menakutkan bagi umat Islam dalam pengaruh pemahamannya. Baik pendidikan, ekonomi, budaya, politik dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, perbedaan pendapat serta pandangan terkait dengan ancaman-ancaman pengaruh Barat terhadap kelompok Islam yang bisa menyerang seseorang ataupun kelompok yang akan dipengaruhinya dan akan berdampak negatif terhadap nilai-nilai Islam ini merupakan di Indonesia dalam

perkembangan bangsa Indonesia, seperti dalam pandangan politik terkait dalam menetapkan dasar negara. Yang mana bagi politik Islam Pancasila sama saja memisahkan agama dalam sebuah negara.

Oleh sebab itu Persis sebagai organisasi keagamaan dan pendidikan merasa bertanggung jawab dan merespon itu semua dengan mencoba mengedepankan syariat Islam sebagai dasar yang hakiki dalam mengatur bangsa Indonesia. Respon yang diberikan oleh Persis paska reformasi adalah bersifat respon (*presuare group*) dan mendukung partai yang sesuai dengan garis perjuangan Persis.

1. Perseteruan Dasar Negara

Masalah yang sangat klasik dalam perdebatan masalah dasar negara telah meninggalkan cerita yang mendalam bagi umat Islam. Masalah ini masih banyak diperbincangkan oleh para elit politik di bangsa ini. Sebab dengan hadirnya reformasi seakan membuka celah bagi kelompok politik Islam (Persis) dalam memperjuangkan cita-cita politik mereka, maka mimpi yang lama yang sudah terkubur disaat zaman paska kemerdekaan sampai zaman Orde Baru. Namun sekarang cerita lama ini hadir kembali kepermukaan setelah adanya reformasi.

Dasar negara merupakan identitas yang melekat dalam diri sebuah negara. sebab, di dalam menetapkan dasar-dasar negara tersebut merupakan sebuah titipan nilai-nilai yang akan dijadikan pedoman bersama dalam hidup di dalam sebuah bangsa.

Kondisi seperti sangat memiliki pengaruh yang sangat cukup signifikan dalam pertanggung jawaban politik yang ada di Indonesia. Setidaknya Islam sebagai

kelompok mayoritas di Indonesia tidak dengan begitu saja menerima pancasila sebagai dasar negara mereka yang tentu sangat kecil dampaknya apabila dibandingkan dengan Islam sebagai dasar negara Indonesia.

Bagi pandangan politik Islam apabila Islam dijadikan dasar negara maka Al-Qur'anpun merupakan petunjuk bagi umat Islam dan manusia dengan kompleksitas yang tertera di dalamnya, yang telah banyak mengatur seluruh kehidupan masyarakat, tentu akan bisa menjawab persoalan-persoalan yang sedang dilanda oleh bangsa Indonesia. kemudian Sebab kegagalan bangsa Indonesia dalam menjawab persoalan yang muncul adalah terlalu menafikkan hukum yang datang dari Tuhan.

2. Perseteruan Pandangan Politik Di Indonesia

Perbedaan dalam pandangan politik masyarakat Indonesia dalam memahami realitas politik tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pemahaman agama dan pendidikannya. Fenomena ini bisa kita lihat dari bagaimana klasifikasi keagamaan yang di gambarkan oleh Geertz¹⁸² dalam penelitiannya masyarakat Jawa di Mujokuto yaitu sebagai berikut:¹⁸³

Pertama, kelompok *abangan*, yang memiliki suatu titik berat pada aspek animistik dari sinkretisme Jawa yang melingkupi semuanya, dan secara luas dihubungkan dengan elemen petani, kedua *santri*, yang mewakili suatu titik berat pada aspek Islam dari sinkretisme itu dan umumnya dihubungkan dengan elemen

¹⁸²Cliffor Gertz Merupakan Seorang Ilmuwan Antropologi Yang Pernah Menjadi Prajurit Laut. Dalam Perkembangan Pemikirannya Gert Di Pengaruhi Oleh Pemikir Seperti Talcon Person Dan Emile Durkheim. Dalam Penelitian Gertz Di Mujokuto Ia Memahami Dan Menganalisis Pemikiran Masyarakat, Struktur Kebudayaan Yang Sakral Dan Agama Yang Ada Di Daerah Tersebut. Dalam Penelitian Ini Sebelumnya Gertz Juga Telah Melakukan Penelitian Di Bali Dan Maroko.

¹⁸³Cliffor Gertz, *Manusia Jawa*, (Jakarta: Pustaka

dagang (dan kepada elemen tertentu di kalangan tani juga). yang ketiga yaitu *priyai*, yang menekankan pada aspek-aspek Hindu dan dihubungkan dengan elemen birokrasi.

Dalam perkembangan kemudian, dikotomi antara santri dan abangan ini melampaui wilayah keagamaan. Kedua golongan ini memiliki orientasi politik yang berbeda, yang kemudian menimbulkan perselisihan dan konflik baik dalam bentuk politik, ideologi, maupun kelas. Perselisihan ini terutama terjadi dalam melihat hubungan antara agama dan politik. Kaum abangan merupakan kelompok yang mendukung gagasan tentang pemisahan total agama dari politik, sementara itu kelompok santri berpandangan bahwa antara agama dan politik harus bersatu. Kemudian perbedaan orientasi politik antara kelompok abangan dan santri ini tercermin dalam perdebatan masalah dasar negara di Konsituante.¹⁸⁴

Sebenarnya di Indonesia sampai sekarang dalam zaman reformasi masalah yang sampai sekarang juga belum ada kepastian yang jelas dalam pandangan politik adalah antara batas agama dan politik dalam sebuah negara. Sebab Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim tentu menginginkan azas perjuangan bangsanya sesuai dengan nilai-nilai Islam yang sangat kompleks dalam mengatur kehidupan mereka.

Masalah dalam pemahaman antara Islam dan kebangsaan ini sampai sekarang masih terasa semangatnya di Indonesia. Setidaknya dalam pandangan

¹⁸⁴Lihat Lili Romly, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Belia, 2006), Hal. 112-113.

politik Islam antara dan kebangsaan memiliki tiga pemahaman yaitu sebagai berikut:¹⁸⁵

Formalisme Islam, pandangan yang menghendaki adanya dasar Islam di Indonesia. Dalam artian negara Indonesia hendaklah sesuai dengan syariat Islam, karena jika Pancasila menjadi dasar negara di Indonesia akan menyebabkan Indonesia menjadi negara sekuler. Oleh sebab itu, untuk mendapat keberkahan Indonesia harus sesuai dengan ajaran mutlak dari Tuhan. Karena Pancasila adalah buatan manusia sedangkan Islam adalah ciptaan tuhan yang tidak akan mungkin salah.

Subtansialisme Islam. pandangan yang beranggapan Indonesia tidak perlu menjadi negara agama (negara Islam). namun penekanannya kepada etika agama (Islam) yang akan memberikan sumbangan-sumbangan pada peran ke negaraan. Bagi paham ini formalisasi agama akan mengerdilkan agama Islam itu sendiri, sehingga Islam akan semakin sempit, hanya sebatas dipahami oleh penfasis, padahal Islam jauh dari itu semua. Paham ini mempercayai Islam itu satu, tetapi memiliki warna yang beragam. Keragaman Islam menunjukkan bahwa dalam Islam, selain terdapat wilayah yang no Ijtihad (dapt dirombak) terdapat pula hal yang ikhwal yang dapat dirombak.

Skularisme Islam, pandangan yang secara tegas memisahkan anatara Islam dan masalah-masalah ke negaraan. Islam mengurus masalah ibadah kepada Tuhan, sedangkan negara mengurus masalah-masalah sosial masyarakat, seperti pendidikan, kemiskinan, penderitaan masyarakat dan seterusnya. Oleh sebab itu,

¹⁸⁵Lihat DR Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012), Hal, 9-51.

antara Islam dan agama harus dipisahkan saja, soalnya negara tidak ikut serta dalam mengurus soal ibadah dan keimanan masyarakat.

Walaupun pandangan politik antara Islam dan negara telah memiliki akar yang sangat panjang di kalangan masyarakat Indonesia, namun masalah Islam dan negara kembali menguat setelah terjadinya reformasi. Jika dalam sejarah sebelumnya kelompok Islam selalu menjadi kelompok pinggiran. Maka untuk saat ini kelompok Islam hadir dengan wajah yang lebih total lagi untuk mewujudkan cita-cita politik Islam agart terciptanya negara yang sesuai dengan hukum Islam di bumi Allah swt ini.

3. Pandangan Politik Persis

Perbedaan pandangan masalah Islam dan kebangsaan mempunyai akar dalam sejarah pergerakan nasional, yaitu antara Soekarno dan A. Hassan (Persatuan Islam) dengan anak muridnya M. Natsir. Bagi A. Hassan hanya Islamlah yang dapat mempersatukan Indonesia dan A. Hassan juga mengharamkan nasionalisme. Sementara Soekarno yang dipengaruhi pemikirannya oleh Soetomo berpendapat persatuan nasionallah yang mampu mencapai tujuan Indonesia merdeka. Pemikiran Soekarno banyak terikat dalam semangat zaman dan cita-cita nasionalisme yang sedang marak di Eropa sesudah Perang Dunia I. Sementara A. Hassan merujuk kepada pemikiran Islam, yang dipengaruhi oleh gerakan khilafat yang ingin mempertahankan khilafat.¹⁸⁶

Dalam perbedaan ini kalau kita pahami antara Soekarno dan A. Hassan yaitu Soekarno mengacu kepada Barat, sedangkan rujukan A. Hassan rujukannya

¹⁸⁶Lihat Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Mesjid: Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik Dalam*

ialah gerakan internasional pan-Islamisme. Namun perbedaan ini sempat dipersatukan oleh Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) dalam masalah Islam dan kebangsaan. Tapi niat baik itu ditolak oleh Persis. Sebab bagi Persis masalah Islam dan kebangsaan merupakan sebuah pemborosan pemahaman. Karena masalah kebangsaan semuanya telah ada diatur oleh Islam, oleh sebab itu tidak perlu lagi menambahkan atau mempersandingkan Islam dan politik. Sebab hakikat Islam lebih tinggi dari pada politik itu sendiri.

Bahkan dalam masalah padangan Persis ini dalam urusan politik dan agama, A. Hassan sebagai guru utama dalam Persis menegaskan pentingnya menegakkan hukum Islam di Indonesia dengan membeda dan menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an seperti berikut, yaitu:¹⁸⁷

ayat QS. Al-Maidah: 44 yang artinya: "*Dan barang siapa tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir*". Kemudian A. Hassan juga menegaskan kembali dengan QS. Al-Maidah: 45 yang artinya: "*Dan barang siapa tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zhallim*". Lebih lanjut lagi yaitu dengan surat QS. Al-Maidah: 47 yang artinya: "*Dan hendaklah orang-orang pengikut injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Dan barang siapa tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik*".

Kutipan tiga ayat yang ada di atas di perjelas oleh A. Hassan. Bahwa orang yang tidak mengambil hukum-hukum Allah buat jadi undang-undang di antara

manusia di dunia dalam urusan akhirat itu, kafir, zhallim, dan fasiq. Walaupun dengan cara apa saja ditafsirkan dan diterangkan, tidak urung tiga ayat itu memberi makna, bahwa manusia, terutama Muslim, wajib menghukum manusia dengan undang-undang yang diturunkan oleh Allah. Sehingga, orang-orang yang tidak menghukum dengan demikian, sekurang-kurangnya, durhaka kepada Allah swt.¹⁸⁸

Maka dari itu, melihat dasar negara Indonesia sendiri yang berdasarkan Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa membuat A. Hassan sebagai roh pembaharu di dalam Persis pun merasakan kebingungan dengan apa yang telah ditancapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Karena bagi pandangan A. Hassan¹⁸⁹ sendiri Ketuhanan itu sifat Tuhan, sebagaimana kepandaian itu sifat pandai, kemanusiaan itu sendiri sifat manusia, dan seterusnya. Oleh sebab itu sifat Tuhan itu tidak bisa jadi dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar negara. kalau penulis undang-undang itu, maksudkan dengan "Ketuhanan" tadi agama Tuhan, tidak betul pula, karena di sini tidak ada satupun agama yang dijadikan dasar.

Bukan hanya di dalam masalah dasar negara saja A. Hassan yang tidak setuju dengan bangsa Indonesia yang telah ditancapkan oleh para pendiri bangsa ini. A. Hassan juga tidak setuju dengan adanya undang-undang. Bagi A. Hassan sendiri selain undang-undang yang bukan didasarkan kepada hukum Allah merupakan undang-undang yang sepenuhnya dipengaruhi oleh fikiran manusia.

Selain dengan dasar negara dan undang-undang, ternyata A. Hassan juga tidak membolehkan untuk menghormati bendera, kemudian A. Hassan juga tidak

mbolehkan menghormati lagu.¹⁹⁰ Sebab bagi A. Hassan sendiri dalam menghormati bendera, patung, lagu-lagu itu dibikin oleh orang Eropa. Maka saran A. Hassan sendiri, orang Islam yang berakal seharusnya tidak menghormati lagi yang senyatanya tidak hidup. Untuk itu, hormati saja siapa yang seharusnya opantas untuk dihormati.

Memahami sikap Persis dalam politik ini, tentulah Persis dalam memahami antara agama (Islam) dalam sebuah negara (Politik) hendaklah jangan pernah dipisahkan. Maka tidak salah Persis berjuang dengan Masyumi sampai dibubarkannya. Kemudian ketika di zaman Orde Baru pun Persis menggunakan penguatan ke dakwah sampai berkerja sama dengan DDII dalam mencapai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam.

Untuk itu pada paska reformasi ini dengan terbukanya ruang publik dalam arena politik seakan membuat Persis selalu berikhtiar dalam merebut kekuasaan dan kemerdekaan politik untuk umat Islam dengan cara tidak melanggar undang-undang, dan sesudah tercapai Persis ingin mendasarkan Indonesia sesuai dengan syariat Islam. Itu semua jelas terlihat ketika Persis menginginkan ditariknya atau amandemen kembali Piagam Jakarta diawal transisi.

Dalam mencapai ini Persis berpandangan bahwa buat mencapai kemerdekaan yang kekal itu, hendaklah kita (umat Islam) bersatu dan membantu. Apa yang diserukan oleh Persis ini sebenarnya senanda dengan apa yang sejak

¹⁹⁰ Dalam Masalah Ini Penulis Juga Pernah Berdiskusi Dengan Para Alumni Pesantren Persis. Bagi Mereka Tidak Dbolehkan Menghormati Bendera Dan Lagu Ini Juga Berlaku Dalam Sekolah Atau Pendidikan Yang Berada Di Bawah Naungan Persis.

dahulu oleh semangat Pan-Islamisme yang telah di wacanakan oleh Jamaluddin al-Afghani dengan serta anak muridnya yaitu M. Abduh dan M. Ridla.

Maka tidak salah jika di dalam Pemilu paska reformasi Persis lebih memiliki kedekatan emosional dengan partai-partai yang memiliki identitas Islam (PBB) dan lain sebagainya untuk mendukung partai tersebut di dalam Pemilu paska reformasi.

Dengan belum tercapainya negara yang berdasarkan syariat Islam. Maka tidak serta merta Persis mundur dalam mewujudkan mimpinya dalam menerapkan formalisasi di Indonesia. Oleh sebab itu, dasar negara sangat berpengaruh dalam Persis merespon arus politik di Indonesia.

2. Karakteristik Afiliasi Politik Persis

A. Analisis Mobilisasi Politik Persis

Mobilisasi yaitu disebabkan oleh melihat maraknya pengaruh Barat di negara Muslim membuat aktivis-aktivis Islam untuk merespon itu semua dengan membangun sumber daya, kekuatan dan jejaringan, solidaritas yang kuat seperti mesjid, kelompok-kelompok studi, mahasiswa, khotbah di mesjid, dan lain-lain. Yang akan dijadikan sebagai alat untuk memobilisasi kesatuan kolektive dalam rangka merespon pengaruh-pengaruh tersebut.

Dalam merespon ini, yang mana, masalah dasar negara yang berazas Pancasila yang lebih cenderung memiliki semangat negara-negara Barat atau sekular yang tidak mengikut campurkan urusan negara dan agama membuat para politik Islam yang dari nya kemerdekaan dan campai dalam reformasi ini berusaha

untuk meresponnya kembali. Seperti kita ketahui setelah reformasi maraknya gerakan revivalis atau Islam transnasional berlabuh di nusantara ini.

Dalam merespon ini tentulah yang dilakukan Persis adalah bagaimana memberi dukungan kepada Partai-partai Islam dalam memperjuangkan cita-cita Persis dan politik Islam dalam mewujudkan negara yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagai organisasi keagamaan yang konsisten dalam dakwah dan tidak mengikuti arus politik dengan cara mendirikan partai politik adalah dengan memberikan atau menitipkan cita-cita politik Islamnya kepada partai Islam.

Tentu antara Persis dan gerakan Islam transnasional yang ada di Indonesia ini tidak bisa dikaitkan dengan Persis begitu saja. Sebab, secara kemunculan saja kita bisa melihat. Bahwa kemunculan Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, NU, dan lain sebagainya itu muncul bukan disebabkan atas respon sezamannya. Oleh sebab itu orientasi politiknya tidak terlihat langsung.

Sedangkan gerakan Islam transnasional yang diimpor, seperti gerakan Tarbiyah Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Hizbut Tahrir dari Yordania dan lain sebagainya, bisa dikatakan kemunculan mereka akibat respon politik runtuhnya supremasi politik Islam di Turki. Maka tidak salah jika gerakan ini menjadikan politik sebagai panglima bagi mereka. Sedangkan Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, NU dan lain sebagainya itu muncul bukan menempatkan politik sebagai tujuan mereka. Tetapi melainkan masalah keagamaan, sosial, pendidikan, dan seterusnya.

Namun antara Persis dan seperti gerakan Tarbiyah Ikhwanul Muslimin di

politiknya yaitu seperti A. Hassan dari Persis menolak nasionalisme, kemudian A. Hassan juga lebih banyak terpengaruh masalah Pan-Islamisme dan juga mendukung gerakan-gerakan yang ingin merevivalis kembali ke khilafahan Ustmani.

Namun dalam hal ini, sebenarnya visi Persis dalam Republik Indonesia (RI) sama halnya seperti pemimpin Muslim yang lain. Perjuangan utama Persis dalam Masyumi adalah untuk menjadikan Islam sebagai dasar Negara negeri ini. Bagi Persis, sekalipun menerima keberadaan RI, namun yang menjadi fokus utama adalah persatuan seluruh kaum Muslimin di bawah bendera “khilafah”. Oleh sebab itu, untuk memungkinkan menuju ke arah sana adalah mutlak bahwa Indonesia harus mengasaskan dirinya pada “Islam”. Oleh sebab itu, Persis bersama-sam dengan eksponen Masyumi lain berusaha sekuat tenaga menjadikan Islam secara legal formal sebagai dasar negara ini. Perjuangan ini terus dilakukan secara konsisten oleh Persis, salah satunya melalui siding-sidang konstituante, hingga akhirnya hasil sidang ini digugurkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Bahkan hingga hari ini, visi Persis tidak berubah, yaitu ingin menjadikan Islam sebagai dasar bagi penyelenggaraan negara ini. Oleh sebab itu, ketika era Reformasi yang amat bebas tiba, maka yang menjadi pertimbangan utama Persis untuk menitipkan idealismenya adalah partai yang memperjuangkan syari’at Islam tegak di bumi Allah.¹⁹¹ Adapun karakter dari mobilisasi yang dilakukan oleh Persis dalam memperjuangkan cita-cita politik Islamnya ini paska reformasi akan

dijelaskan di bawah ini adalah yaitu bersifat intruksi dan fragmentasi suara jam'iyah Persis.

1. Bersifat Intruksi

Terlepas dari pengaruh dunia Barat dalam mempengaruhi corak politik para pendiri bangsa dan generasi penerus yang telah dijelaskan di atas terkait dengan ini mobilisasi merupakan respon dari aktivis Islam terkait itu semua, kemudian persetujuan politik terkait dasar negara, pandangan politik, dan cita-cita politik Islam setidaknya bisa dikatakan telah membuat Persis memobilisasi kekuatan untuk memenangkan partai politik Islam yaitu PBB sebagai pemenang dalam pemilu 1999. Tentu apa yang dilakukan oleh Persis pada saat itu adalah merupakan respon terhadap tujuan politik Persis dan politik Islam dalam menciptakan negara yang sesuai dengan kedaulatan hukum Tuhan.

Adapun apa yang dilakukan Persis dalam mendukung satu partai politik yaitu PBB tentu ini semua bukan tanpa sebab, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Persis tidak mendirikan partai politik paska reformasi.
- b. Adanya kedekatan Persis dengan PBB. Setidaknya Persis ikut dalam membidani PBB ketika Persis tergabung dalam BKUI.
- c. Antisipasi Persis dalam konflik internal di dalam tubuh Persis. Sebab Pemilu yang mendesak dan banyak kader Persis yang ikut kepolitik

2. Fragmentasi Suara Jam'iyah Persis

Sebenarnya sikap politik Persis yang hanya mendukung satu partai politik saja seakan adanya penghegemonian suara jam'iyah Persis agar fokus dalam memenangkan hanya satu partai saja yaitu PBB.

Berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Yang mana Persis hanya mendukung satu partai politik saja. Maka untuk Pemilu selanjutnya Persis membuka komunikasi kepada partai Islam lainnya. Adanya komunikasi politik Persis bukan hanya dengan satu partai Islam ini bisa kita pahami merupakan sebuah strategi politik Persis dalam memecah suara jam'iyah Persis.

Kalu kita melihat gambaran dari pemilu 1999 terkait partai islam yang tidak mendapatkan suara yang sangat signifikan yaitu sebanyak sembilan partai politik Islam (KAMI, PUI, PAY, PIB, SUNI, PSII1905, PMB, PID, dan PUMI) tidak memperoleh satu kursipun di DPR: sebanyak empat partai Islam (PP, PPI, Masyumi, PSII, PKU) hanya memperoleh satu kursi di DPR, sedangkan PNU dan PK masing-masing memperoleh lima dan tujuh kursi. Dari ketujuh belas partais Islam yang ikut Pemilu, hanya PPP (58 kursi) dan PBB (kursi) yang lolos *electoral thresol*. Dan sebanyak 15 partai Islam yang tidak lolos *electoral thresol*.¹⁹²

Partai-partai yang telah disebutkan di atas ini merupakan partai-partai Islam yang menginginkan pemberlakuan syariat Islam. Maka kemudian dengan mirisnya hasil suara politik Islam dan sedikitnya partai Islam di dalam parlemen tentu sangat menyulitkan partai tersebut bertarung dengan partai non-Islam dalam

pengambilan kebijakan yang mendukung ke arah tujuan politik Islam yaitu berlakunya syariat Islam.

Setidaknya dengan adanya pemecahan suara Persis ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi partai-partai Islam untuk lolos ke parlemen. baik ditingkat Daerah maupun Nasional. Yang seperti yang kita ketahui karena parlemen itu sendiri adalah lembaga yang akan membuat peraturan perundang-undangan dan juga yang menyetujui kebijaksanaan yang dibuat oleh esekutif.

Maka dengan adanya pemecahan suara jam'iyah Persis ini setidaknya membantu partai Islam lebih banyak lagi untuk masuk ke parlemen dan kalau syukur bisa memenangkan Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati dari kelompok politik Islam. Dan kemudian itu semua terbukti ketika partai Islam telah kuat di dalam parlemen meskipun bukan mendominasi, setidaknya mereka berhasil mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan politik Islam.

Seperti yang terlihat dalam pengakuan MK (Mahkama Konsistusi) pada tahun 2008 bahwa Indonesia sekarang ini, sepertinya sedang bergerak dan bergeser dari negara Pancasila menuju Negara Islam.¹⁹³

Ini bisa kita lihat dari waktu ke waktu, dalam pencapaian grafik Peraturan Daerah atau Perda Syari'ah yang menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2003 ada 7 daerah yang menerapkan Perda Syari'ah, maka untuk selanjutnya hingga maret 2007 sudah lebih dari 10 persen dari seluruh daerah di Indonesia yang menerapkan Perda Syari'ah, dan jumlah ini akan terus bertambah.

¹⁹³ Lihat Buku Berjudul: *Ilusi Gerakan Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*, T. Hita, Gendak, Dhikha, Tumpalika, The Wahid Institute dan Majelis Insipite Yang Hal. 129.

Bahkan setelah disahkannya UU APP telah berdampak negatif kepada daerah, seperti dilarangnya tari Jaipong yang merupakan tarian khas daerah Jawa Barat.¹⁹⁴

Oleh sebab itu, dengan maraknya kebijakan-kebijakan yang berdasarkan Syari'ah. Bisa dikatakan merupakan keberhasilan politik Islam dalam rangka mencapai formalisasi Islam di Indonesia. Sehingga jalan politik Islam dalam menuju negara Islam di Indonesia memang akan menjadi terbuka di negara Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila.

Maka tidak salah jika mobilisasi dukungan Persis yang bersifat instruksi dan fragmentasi suara jam'iyah terhadap partai Islam ini memberikan dampak bagi cita-cita politik Persis. Yang perlahan tapi pasti akan membuat kebijakan yang pro terhadap formalisasi Islam di Indonesia berdasarkan UU, Perda, atau Konsistusi di dalam negara.

3. Pertimbangan Afiliasi Politik Persis

A. Analisis Framing Politik Persis

Analisis framing yaitu merupakan suatu penekanan pada proses pembangunan wacana dan paket-paket ideasional yang dihasilkan oleh suatu gerakan khususnya aktivisme Islam. Agar pemingkalian yang dilakukan memiliki argumen yang baik dalam mendapatkan dukungan dan partisipasi oleh semua lapisan.

Dalam mencapai untuk tegaknya negara yang sesuai hukum Islam seperti yang diinginkan Persis. Maka dibutuhkan jalan untuk menempuh dengan selain

oleh partai politik Islam dalam membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan politik Islam yang telah dijelaskan di atas.

Dalam mencapai cita-cita politik ini Persis tentunya menggunakan framing atau pembingkaiian wacana dengan cara memberikan dukungan kepada partai-partai politik yang akan memperjuangkan aspirasi politik Persis. Setidaknya perjuangan partai yang sejalan dengan perjuangan politik Islam.

Maka dalam mendapat dukungan oleh para lapisan jam'iyah Persis dari atas sampai bawah, untuk itu dibutuhkan sebuah pembingkaiian wacana dalam mencapai tujuan tersebut. Sebab sebagai organisasi yang tidak memiliki anggota istimewa di dalam salah satu partai politik, yang bisa dilakukan Persis adalah pembuatan wacana yang bisa dijadikan alat legitimasi Persis untuk memobilisasi jam'iyahnya dalam mendukung salah satu atau lebih partai politik.

Maka dalam mendukung Partai yang dilakukan Persis tersebut dalam menyalurkan aspirasi politik Persis tersebut setidaknya dilakukan dengan cara seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. Respon Politik Persis

Dalam Pemilu paska reformasi ini Persis memiliki pandangan politik lebih cenderung bersifat responsif dan bukanlah konstruktif. Sebab, selama Pemilu paska reformasi Persis telah melihat sifat yang tidak membangun kekuatan politik untuk mencapai cita-cita politiknya. Seperti mendirikan partai politik atau penyebaran kader kepartai politik.

Itu semua bisa kita pahami dari sikap politik Persis dalam kuatnya larangan

yang bergabung dengan partai politik. Sebab, bagi kader Persis tidak dibolehkan rangkap jabatan. Dan jika ingin berpolitik praktis dalam sebuah partai politik, maka hanya ada dua kemungkinan bagi mereka yaitu antara organisasi Persis atau memilih politik. Kemudian semua keputusan ini haruslah mendapat persetujuan dari Pimpinan Pusat Persis.

Jika kader Persis memilih politik, maka secara anggotaan bisa saja dia gugur. Dan Persis Cuma bisa memberikan harapan agar berjuanglah dengan tujuan politik Islam. Di sini tentu juga jangan membawa nama Persis atas kepentingan politiknya.

Tidak inginya Persis membangun kekuatan politik di dalam partai politik paska reformasi ini dalam mencapai tujuannya bisa kita pahami dari sikap politik Pemuda Persis yaitu sebagai berikut:¹⁰⁵

Pertama, kondisi politik kepartaian yang dianggap masih belum aman untuk tumbuhnya kader idealis yang diinginkan oleh Pemuda Persis. Sebab, kondisi politik yang dikuasai pragmatisme dan uang, bahkan hampir-hampir tidak ditemukan lagi ideologi dalam partai, menyebabkan siapa pun yang masuk ke dalamnya akan sulit untuk menjaga dirinya. Fitnah ada di mana-mana. Tidak ikut terlibat dalam gelimangan uang kotor pun, paling tidak tahu bahwa hak demikian terjadi, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi di tengah suasana kekuasaan yang hanya menghargai kekuatan kapital. Mereka yang tidak memiliki modal

¹⁰⁵[Http://PemudaPersisjabar.Wordpress.Com/Artikel/Tiar-Anwar-Bachtiar/Potensi-Politik-temas-Dalam-Sistem-Kepolitikkan-Indonesia-Melalui-Konsep-Persis-Dan-Pemuda-Persis](http://PemudaPersisjabar.Wordpress.Com/Artikel/Tiar-Anwar-Bachtiar/Potensi-Politik-temas-Dalam-Sistem-Kepolitikkan-Indonesia-Melalui-Konsep-Persis-Dan-Pemuda-Persis)

hanya dianggap "pengemis" yang tengah mengais-ngais rezeki di tengah pertarungan politik (uang) negeri ini.

Kedua, Pemuda Persis tidak ingin konsentrasinya pada kaderisasi terganggu akibat keterlibatan anggota-anggotanya dengan politik, apalagi pemimpinnya. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa konsentrasi Pemuda Persis adalah mempersiapkan kader-kader terbaik untuk menjadi kader Persis dan kader umat yang kokoh secara keimanan, tangguh secara keilmuan, dan cakap menghadapi berbagai tantangan zamannya. Tugas mempersiapkan kader ini bukan tugas yang mudah. Tidak bisa dilakukan sambil-an. Harus ada keseriusan dan konsentrasi.

Ketiga, *conflict of interest* yang sangat mungkin terjadi antara visi jam'iyah dengan kepentingan pramatis parpol atau bahkan dengan visi parpol itu sendiri. Alasan ketiga ini yang sangat penting menyangkut ideologi gerakan yang saat ini terasa "asing" saat diperbincangkan di tengah tren politik-uang. Akan tetapi, bagi Pemuda Persis yang sejak awal memperjuangkan ideologi, bukan keuntungan dan kepentingan materi, maka poin ini menjadi sangat penting. Pemuda Persis menyadari sepenuhnya bahwa tidak setiap parpol memperjuangkan ideologi yang sama seperti yang diperjuangkan Pemuda Persis. Kalau ada anggota Pemuda Persis yang akhirnya bergabung dengan Parpol dengan visi ideologis yang berbeda, jelas ini kontra produktif dengan misi Pemuda Persis. Ini juga bisa diartikan bahwa yang bersangkutan "gagal" dikader oleh Pemuda Persis sehingga memilih untuk memperkuat barisan orang lain yang memperjuangkan ideologi yang berbeda. Oleh sebab itu, bagi anggota Pemuda Persis yang seperti itu dipersilakan untuk menentukan pilihan antara Pemuda Persis atau yang lain

Melihat argumen-argumen di atas cukup tegas bahwa Pemuda Persis saat ini memilih untuk tidak berada di dalam arus politik “parpol”.¹⁹⁶

Pertama, Pemuda Persis adalah salah satu bagian dari *civil society* yang keberadaan dan hak-hak politikya diakui negara. Jadi, tanpa harus menjadi parpol, bergabung dengan parpol tertentu, atau “menitipkan” kadernya kepada parpol tertentu, secara inheren di dalam tubuh Pemuda Persis ada kekuatan politik yang efektif dan dapat digunakan secara langsung untuk ikut menentukan kebijakan negara.

Kedua, visi politik itu bukan hanya sekedar memengaruhi kebijakan, tetapi juga pada aspek implementasi kebijakan dan hukum di masyarakat (*tanfidz*). Pemerintah memiliki perangkat untuk tujuan politik yang satu ini. Perangkatnya disebut “aparatus penegak hukum” seperti birokrasi, polisi, pengadilan, jaksa, dan sebagainya. Akan tetapi, “badai uang” yang melanda negeri ini telah melumpuhkan kekuatan aparat penegak hukum sehingga berakibat *law disobedience* (ketidaktaatan pada hukum) terjadi di mana-mana. Aparatus tidak banyak yang bisa bertindak tegas. Banyak peraturan perundangan yang akhirnya hanya jadi macan kertas. Secara politik, ini adalah suatu bentuk kegagalan lain.

Sikap Persis dalam merespon politik ini sangat sesuai dengan pandangan politik E. Abdurrahman disaat menyelamatkan Persis akan dijadikan partai politik. Bagi E. Abdurrahman lebih menekankan bahwa Persis sebagai organisasi

¹⁹⁶ [Http://PemudaPersisjabar.wordpress.com/Artikel/Tiar-Anwar-Bachtiar/Potensi-Politik-](http://PemudaPersisjabar.wordpress.com/Artikel/Tiar-Anwar-Bachtiar/Potensi-Politik-)

dakwah yang memiliki perjuang dalam agama dan pendidikan, maka yang harus dikerjakan Persis cukup itu saja.

Maka untuk selanjutnya di dalam bidang yang tidak menjadi titik fokus perjuangan Persis. Sepertinya kelihatan di dalam ranah bukan perjuangan utama Persis lebih memilih untuk di dalam ranah politik seperti yang dilakukan oleh E. Abdurrahman. Yaitu lebih mempercayakan kepada partai-partai politik Islam yang telah hadir pada saat itu seperti Masyumi, PSII, dan NU (pada saat demokrasi terpimpin).

Kemudian kalau kita lihat dari sikap politik Persis ini dalam ruang paska reformasi ini, tidaklah jauh berbeda dengan sikap politik E. Abdurrahman di saat demokrasi terpimpin. Kita bisa memahami dari sikap Persis yang tidak terlibat arus reformasi dengan mendirikan partai politik dan kemudian Persis hanya memilih sebagai kelompok penekan (*Preasuaré Group*). Untuk itu, tidak salah jika Persis lebih memilih mendukung partai politik yang sudah hadir dengan pertimbangan kesamaan perjuangan dan tujuan politik Persis dalam partai tersebut.

2. Platform Sebagai Pertimbangan Afiliasi Politik

Sebagai organisasi keagamaan yang tidak memiliki atau menciptakan kendaraan politik (partai) yang bisa dilakukan Persis adalah mendukung partai-partai politik yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita politik Persis. Konsistensi yang dipilih Persis sebagai organisasi yang tidak menjadi atau mendirikan partai politik, mau tidak mau harus membuat Persis menipkan cita-cita politiknya

kepada partai politik dalam setiap Pemilu

Harapan dengan mendukung dan memberikan suara atau pilihan kepada partai politik Islam merupakan sebuah representasi politik Persis di legislatif ataupun esekutif dalam memperjuangkan itu semua. Jika pun partai Islam tidak pernah mendominasi esekutif, namun setidaknya ada wakil partai politik Islam yang bergabung di dalam esekutif dan ini tentu sangat bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang di buat oleh Presiden tersebut.

Oleh sebab itu, dengan adanya terbuka komunikasi politik Persis dan mempersilahkan partai-partai tersebut untuk berkampanye, sebenarnya secara tidak langsung Persis memiliki harapan terhadap partai tersebut dalam memperjuangkan mimpi politik Persis dalam mewujudkan formalisasi Islam di Indonesia dalam ranah yang sesuai dengan konsistusi dan tidak melanggar hukum.

Maka dari itu, untuk mencapai tujuan itu semua. Tentunya Persis memilih dan melihat partai mana yang akan bisa dijadikan tumpangan sebagai orang atau kelompok yang akan bisa memperjuangkan kepentingan politik Persis. Oleh sebab itu, tidak salah jika Persis selalu memiliki kepercayaan kepada partai-partai Islam dalam memperjuangkan politik Persis di setiap Pemilu, agar bisa bekerja di dalam ranah pemerintahan.

Sesua dengan pernyataan Tiar Anwar Bachtiar, Persis akan mendukung partai politik tersebut sejauh partai tersebut berjalan di dalam arus yang memperjuangkan cita-cita politik Islam agar terciptanya negara Islam di dalam negara Indonesia ini yang sesuai dengan syariat Islam.

Maka kita bisa memahami, secara tidak langsung dari apa yang di untkan oleh Persis di atas akan mengarah kepada partai politik Islam

Seperti hasil wawancara yang telah diutarakan oleh Tiar Anwar Bachtiar di atas, secara tidak langsung merupakan partai-partai yang memiliki pandangan untuk diberlakukan syariat Islam (lebih lanjutnya bisa dilihat di dalam Islam Yes Partai Islam Yes).¹⁹⁷

Bahkan yang memiliki basis masa di organisasi keagamaan seperti PAN dan PKB. Meskipun partai ini tidak memperjuangkan syariat Islam dalam perjuangan partainya. Namun setidaknya karena partai tersebut dari kedekatan organisasi keagamaan, Persis lebih memiliki keyakinan dan memberikan dukungan kepada partai tersebut dibandingkan dengan partai-partai non-Islam.

¹⁹⁷ Lihat Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), Hal, 136.